



Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural

Azka Khairani¹, Nafisa Insani Hakiki², Muhamad Yopan³

^{1,2,3}Universitas Indonesia

E-mail: azka.khairani@ui.ac.id, nafisa.insani@ui.ac.id, [muhamad.yopan18@ui.ac.id](mailto:m Muhamad.yopan18@ui.ac.id)

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 2024-11-11 Revised: 2024-12-23 Published: 2025-01-02</p> <p>Keywords: <i>Education;</i> <i>Papua;</i> <i>School Dropouts;</i> <i>Functional Structure.</i></p>	<p>Education plays a crucial role in improving the quality of human resources and fostering social justice. However, in Papua, the high dropout rate poses a significant challenge, influenced by various economic, social, geographical, and cultural factors. According to data from the Central Statistics Agency, Papua records the highest national dropout rates at the elementary school level (2.38%) and junior high school level (3.22%). The main contributing factors include economic limitations (22.66%), the long distance to educational facilities (13.52%), and the demand for child labor (12.73%). This study examines the dropout phenomenon in Papua through Émile Durkheim's structural functionalism theory. Education is understood as a social fact that transmits values and norms, fosters social solidarity, and maintains societal balance. However, the mismatch between the formal education system and local norms creates social dysfunction, such as anomie. Social solidarity, whether mechanical or organic, is difficult to establish due to the lack of infrastructure, qualified teachers, and relevant policy support. The study employs a literature review method and qualitative descriptive analysis, utilizing data from official documents and academic literature. The findings suggest the need to integrate local values into educational policies, improve infrastructure, and provide economic support to address the dropout issue. These recommendations are expected to guide policymakers in developing holistic solutions to enhance access to and the quality of education in Papua.</p>
<p>Artikel Info</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-11 Direvisi: 2024-12-23 Dipublikasi: 2025-01-02</p> <p>Kata kunci: <i>Pendidikan;</i> <i>Papua;</i> <i>Putus Sekolah;</i> <i>Struktural Fungsional.</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan keadilan sosial. Namun, di Papua, tingginya angka putus sekolah menjadi tantangan besar, dengan berbagai faktor seperti masalah ekonomi, sosial, geografis, dan budaya yang memengaruhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Papua mencatat angka putus sekolah tertinggi secara nasional di tingkat SD (2,38%) dan SMP (3,22%). Faktor utama meliputi keterbatasan ekonomi (22,66%), jarak fasilitas pendidikan yang jauh (13,52%), serta tuntutan bekerja bagi anak-anak (12,73%). Penelitian ini menganalisis fenomena putus sekolah di Papua melalui pendekatan teori struktural fungsional Émile Durkheim. Pendidikan dipahami sebagai fakta sosial yang mentransmisikan nilai dan norma, menciptakan solidaritas sosial, dan berfungsi menjaga keseimbangan masyarakat. Namun, ketidakcocokan antara sistem pendidikan formal dan norma lokal menciptakan disfungsi sosial, seperti anomie. Solidaritas sosial, baik mekanis maupun organik, sulit terbangun akibat minimnya infrastruktur, tenaga pengajar berkualitas, dan dukungan kebijakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup data dari dokumen resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pendidikan, peningkatan infrastruktur, dan dukungan ekonomi untuk mengatasi masalah putus sekolah. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dalam merancang solusi holistik untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua.</p>

I. PENDAHULUAN

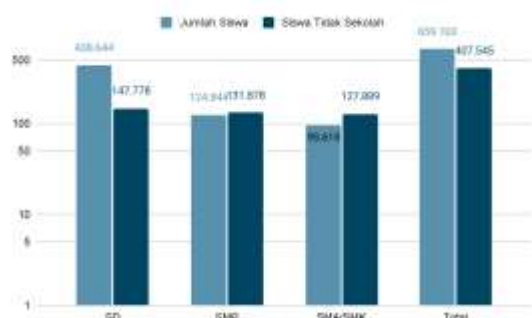
Pendidikan memegang peranan krusial dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia karena pada dasarnya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh akses pendidikan yang layak. Hak ini tidak hanya diakui sebagai kebutuhan mendasar, tetapi juga sebagai

tanggung jawab negara untuk memastikan terciptanya keadilan sosial di semua lapisan masyarakat (Saepuloh & Suherman, 2018). Pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan sosial. Pemberian akses pendidikan yang merata

menjadi esensial untuk menciptakan peluang yang setara bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, maupun geografis mereka. Selain itu, pendidikan juga menjadi alat utama untuk mencetak generasi penerus yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

Kendati demikian, permasalahan yang masih sering dihadapi dalam dunia pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah di kalangan siswa. Anak putus sekolah merujuk pada siswa yang tidak mampu menyelesaikan program pendidikan hingga tuntas atau gagal menyelesaikan jenjang belajar yang seharusnya dirampungkan (Ridwan, Irawaty, dan Momo, 2019). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, angka putus sekolah mengalami kenaikan yang signifikan di seluruh jenjang pendidikan mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan data menurut wilayah, Papua mencatatkan angka putus sekolah tertinggi di tingkat SD dengan persentase sebesar 2,38%. Selain itu, tingkat SMP di Papua juga menunjukkan angka putus sekolah tertinggi secara nasional, yaitu mencapai 3,22% (Widi, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga pernah mencatat bahwasannya pemuda yang tidak pernah bersekolah di Provinsi Papua sebesar 21,1% pada tahun 2020 dan diikuti oleh Papua Barat sebesar 1,80% di urutan selanjutnya. Persentase tertinggi ini menunjukkan urutan Papua yang jauh tinggi dibanding dengan provinsi lain di Indonesia (Rizaty, 2021).



Grafik 1. Total Siswa Sekolah dan Tidak Sekolah Provinsi Papua. Sumber: Sumule, 2021

Sebagai provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, Papua memiliki karakteristik geografis yang unik dan menantang. Kondisi geografis ini secara langsung mempengaruhi distribusi fasilitas pendidikan dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang berkontribusi

pada berbagai hambatan bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak. Faktor utama yang menyebabkan penduduk usia 5-24 tahun di Provinsi Papua tidak pernah bersekolah atau berhenti sekolah adalah masalah biaya, dengan persentase sebesar 22,66%. Selain itu, alasan kedua yang banyak ditemukan, khususnya pada kelompok usia 5-6 tahun, adalah belum cukup umur untuk bersekolah, yakni sebesar 22,11%. Faktor lainnya adalah jarak fasilitas pendidikan yang terlalu jauh, yang menyumbang sebesar 13,52%, serta alasan bekerja atau mencari nafkah, yang mencapai 12,73% (Jayani, 2019).

Masalah biaya mencerminkan rendahnya daya dukung ekonomi sebagian besar keluarga di Papua sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas. Tidak kalah penting, anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem pendidikan yang seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah ekonomi, sosial, geografis, maupun kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Ketidakmampuan menyelesaikan pendidikan ini berdampak serius bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, hal ini dapat membatasi peluang masa depan seperti akses ke pekerjaan yang layak atau kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan bagi masyarakat, tingginya angka putus sekolah dapat memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat pembangunan manusia.

Penelitian terkait angka putus sekolah di Indonesia telah banyak dilakukan dengan pendekatan yang beragam. Penelitian oleh Hirzi, et al. (2023) menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada jenjang pendidikan SD hingga SMK masih cukup tinggi dengan faktor utama meliputi kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM), angka partisipasi murni (APM), dan tingkat buta huruf. Penelitian tersebut menggunakan metode Generalized Poisson Regression (GPR) untuk menganalisis faktor-faktor tersebut dan hasilnya menegaskan bahwa faktor ekonomi seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran berperan signifikan.

Sementara itu, Saepuloh & Suherman (2019) dalam studi mereka di Kota Tangerang menemukan bahwa lemahnya kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi penyebab dominan tingginya angka putus sekolah. Pekerjaan orang tua yang sebagian besar sebagai pedagang kecil,

pemulung, dan buruh pabrik dengan pendapatan rendah, serta kurangnya upaya orang tua dalam membujuk anak melanjutkan pendidikan. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya intervensi langsung dalam bentuk bantuan ekonomi dan program pendidikan inklusif untuk mengatasi masalah tersebut.

Sejalan dengan itu, Mubarokah, Budiantara, dan Ratna (2016) menyoroti tingginya angka putus sekolah di Papua yang pada 2013 berada di atas rata-rata nasional dengan angka 2,26%. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi nonparametrik spline linier untuk memodelkan pengaruh faktor-faktor seperti persentase penduduk miskin, laju ekonomi, rasio guru-murid, rasio sekolah-murid, dan angka putus sekolah tingkat SD terhadap tingkat SMP. Model ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi sangat signifikan dalam mempengaruhi angka putus sekolah, dengan nilai R^2 sebesar 98,648%.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena putus sekolah di Papua melalui kajian teori dan literatur. Sumber data penelitian mencakup dokumen resmi, seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), jurnal akademik, serta laporan dari lembaga terkait pendidikan.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan aspek sosial, ekonomi, geografis, dan budaya yang mempengaruhi putus sekolah di Papua. Tahap terakhir adalah analisis fenomena menggunakan kerangka teori struktural Emile Durkheim, meliputi teori fakta sosial, yang melihat pendidikan sebagai fenomena kolektif yang dipengaruhi norma dan struktur sosial; teori solidaritas sosial, yang menyoroti ketidaksesuaian sistem pendidikan formal dengan nilai lokal yang melemahkan kohesi sosial; dan teori anomie, yang menjelaskan disorientasi akibat kegagalan sistem pendidikan dalam memenuhi harapan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan memberikan wawasan teoritis dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan sebagai Fakta Sosial dalam Masyarakat Papua

Menurut pandangan Durkheim, pendidikan memainkan peran penting dalam proses ini, yaitu sebagai sarana untuk mentransfer nilai-nilai, norma, keterampilan, dan pengetahuan dari generasi yang lebih tua kepada generasi muda. Proses sosialisasi ini bertujuan untuk membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan sosial (Huda, Saputra, dan Fatmi, 2015). Dalam konteks angka putus sekolah di Papua, pandangan Durkheim dapat digunakan untuk memahami bagaimana struktur sosial dan norma masyarakat mempengaruhi keputusan individu, termasuk dalam hal pendidikan. Ketidakmampuan anak-anak Papua untuk melanjutkan sekolah, misalnya, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat sekitar. Dalam beberapa komunitas di Papua, tekanan untuk bekerja membantu keluarga atau norma budaya tertentu mungkin menjadi prioritas dibandingkan melanjutkan pendidikan.

Dalam hasil penelitian Navoleon & Muljanto (2023) mengemukakan beberapa fenomena kondisi pendidikan di Papua. Pertama, rendahnya angka harapan sekolah sebesar 46,6% penduduk yang tidak melanjutkan pendidikannya—membuktikan masih minimnya ekspektasi masyarakat terhadap nilai pentingnya pendidikan. Angka ini mencerminkan tantangan signifikan dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas yang berdampak serius pada perkembangan individu dan sosial ekonomi wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Durkheim, bahwasannya kurangnya dukungan dari struktur sosial, seperti ekonomi dan budaya dapat menghambat individu dalam memprioritaskan pendidikan.

Kedua, faktor sosial-ekonomi menjadi salah satu hambatan utama yang mencakup kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, dan tantangan geografis. Ketika dasar, termasuk biaya sekolah dan sarana pendukung, sulit terpenuhi, pendidikan cenderung tidak menjadi prioritas. Ini menunjukkan bahwa norma ekonomi masyarakat Papua mungkin belum cukup mendukung pendidikan sebagai kebutuhan utama, yang merupakan tantangan dalam konteks fakta sosial.

Ketiga, faktor budaya dan tradisi turut berperan dalam menentukan angka putus sekolah di Papua. Persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepercayaan lokal membentuk sejauh mana mereka memandang pentingnya pendidikan. Sayangnya, kepercayaan tentang budaya dan tradisi membuat pemahaman terhadap peran aspek ini dalam mendorong atau menghambat pendidikan menjadi terbatas. Hal ini sesuai dengan pandangan Durkheim bahwa norma yang dominan dalam masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk pola perilaku, termasuk persepsi terhadap pendidikan (Huda, Saputra, dan Fatmi, 2015).

Untuk mengatasi angka putus sekolah di Papua, pendekatan berbasis fakta sosial ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan *budaya* setempat. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan pendidikan agar masyarakat merasa terhubung dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

B. Solidaritas Sosial dan Perannya dalam Sistem Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial, yang menurut Émile Durkheim terbagi menjadi solidaritas mekanis dan organik. Papua, sebagai pulau dengan tingginya angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP menunjukkan adanya tantangan besar dalam mencapai solidaritas sosial melalui pendidikan. Ketimpangan dalam akses pendidikan di wilayah ini tidak hanya menghambat penyebaran nilai-nilai yang mendukung solidaritas mekanis tetapi juga menghalangi pembentukan solidaritas organik yang dibutuhkan dalam masyarakat modern.

Kurangnya infrastruktur pendidikan di Papua menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya pembangunan solidaritas sosial. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, dan alat bantu pembelajaran. Kondisi ini melemahkan kemampuan pendidikan untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial kepada generasi muda (Manik, Prasetyo, dan Sulisty, 2023). Menurut Durkheim, solidaritas mekanis terbentuk melalui kesamaan nilai, tetapi ketika fasilitas pendidikan minim, nilai-nilai bersama sulit ditanamkan secara efektif. Selain itu, akses transportasi yang terbatas

membuat banyak anak kesulitan menjangkau sekolah, memperburuk risiko putus sekolah.

Kekurangan tenaga pengajar berkualitas juga berdampak signifikan pada kemampuan pendidikan untuk membangun solidaritas. Guru-guru yang ditempatkan di Papua sering kali menghadapi kondisi geografis yang sulit dan minimnya insentif, yang menyebabkan mereka enggan bertahan lama. Akibatnya, anak-anak di Papua tidak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Costa, 2023). Solidaritas organik, yang mengandalkan keberagaman peran dan kompetensi, menjadi sulit tercapai karena sistem pendidikan tidak mampu membekali anak-anak Papua dengan kemampuan yang memadai untuk berkontribusi dalam struktur sosial.

Faktor sosial dan ekonomi turut memperburuk situasi. Banyak keluarga di Papua hidup dalam kondisi kemiskinan, yang menyebabkan mereka tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya. Anak-anak sering kali diminta membantu pekerjaan rumah tangga untuk mendukung ekonomi keluarga, sehingga mereka harus mengorbankan pendidikan (Manik, Prasetyo, dan Sulisty, 2023). Hal ini melemahkan solidaritas organik karena individu yang tidak terdidik akan kesulitan memenuhi peran yang diperlukan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, sistem pendidikan yang kurang peka terhadap budaya lokal juga menjadi hambatan. Bahasa pengantar yang berbeda dengan bahasa ibu anak-anak Papua menciptakan kesenjangan pemahaman, yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan pendidikan dalam menyampaikan nilai-nilai solidaritas mekanis.

C. Anomie dan Disfungsi dalam Sistem Pendidikan di Papua

Durkheim menjelaskan bahwa *anomie* adalah kondisi ketidakseimbangan dalam masyarakat yang terjadi ketika norma-norma sosial gagal memberikan arah atau panduan yang jelas bagi individu. Dalam konteks pendidikan, *anomie* muncul ketika sistem pendidikan tidak mampu memenuhi harapan individu atau kelompok masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan motivasi dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Di Papua, ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan realitas sistem

pendidikan menjadi faktor utama munculnya kondisi *anomie*. Pendidikan, yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial dan pembangunan masyarakat, sering kali gagal memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Papua. Salah satu penyebabnya adalah kurikulum nasional yang seragam dan tidak mempertimbangkan kebutuhan sosial serta budaya lokal. Ketika materi pendidikan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari atau prospek masa depan mereka, anak-anak cenderung kehilangan minat dan merasa bahwa pendidikan formal tidak memiliki nilai bagi kehidupan mereka (Iriawan, 2024).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendidikan di Papua memperburuk kondisi ini. Sekolah yang sulit diakses, minimnya jumlah guru berkualitas, dan fasilitas yang tidak memadai menciptakan pengalaman belajar yang jauh dari ideal. Anak-anak Papua menghadapi realitas pendidikan yang penuh dengan hambatan, sehingga mereka merasa putus asa dan kehilangan arah (Iriawan, 2024). Kegagalan sistem pendidikan dalam menyediakan pengalaman yang positif dan bermanfaat menyebabkan mereka tidak lagi melihat pendidikan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik, yang merupakan esensi dari kondisi *anomie*.

Kemiskinan yang meluas di Papua juga memperkuat *anomie* dalam sistem pendidikan. Keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan sering kali lebih mengutamakan kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal dibandingkan pendidikan anak-anak mereka. Dalam situasi ini, pendidikan kehilangan makna sebagai prioritas, terutama jika anak-anak harus membantu keluarga dalam pekerjaan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak keluarga memandang pendidikan sebagai beban daripada investasi jangka panjang, yang semakin memperkuat hilangnya arah dan motivasi terhadap pendidikan formal.

Konsekuensi dari kondisi *anomie* dalam sistem pendidikan di Papua adalah meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat partisipasi dalam pendidikan formal. Anak-anak yang keluar dari sistem pendidikan cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan dan memiliki akses terbatas terhadap peluang kerja yang lebih baik. Ketidakterpenuhinya harapan ini tidak hanya berdampak pada

individu tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat, karena solidaritas sosial tidak dapat berkembang tanpa pendidikan yang merata dan inklusif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Angka putus sekolah di Papua merupakan tantangan serius yang mencerminkan kompleksitas kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Minimnya dukungan dari struktur sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta kurangnya infrastruktur pendidikan menjadi hambatan utama bagi anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, nilai-nilai budaya dan norma lokal yang sering kali tidak memprioritaskan pendidikan turut memperkuat rendahnya partisipasi sekolah. Dalam perspektif Émile Durkheim, fenomena ini menggambarkan kondisi *anomie* dimana norma-norma sosial gagal memberikan arahan yang jelas kepada individu terkait pentingnya pendidikan. Ketidaksesuaian antara kurikulum nasional dan kebutuhan lokal memperburuk situasi sehingga pendidikan kehilangan relevansinya di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan kontekstual sangat dibutuhkan seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang terjangkau, integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kebijakan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh. Penelitian lanjutan dapat berfokus pada implementasi strategi-strategi ini untuk memastikan pendidikan menjadi lebih relevan dan dapat diakses sehingga berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi di Papua.

B. Saran

1. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan yang Inklusif

Untuk mengatasi tantangan geografis, perlu dibangun sekolah-sekolah satelit di daerah terpencil yang dilengkapi dengan fasilitas dasar. Dengan demikian, anak-anak di wilayah terpencil tidak lagi harus menempuh jarak jauh yang melelahkan atau berbahaya hanya untuk belajar. Alternatif lainnya adalah memanfaatkan teknologi pendidikan jarak jauh (e-learning) yang sesuai dengan kondisi daerah terpencil di Papua dengan teknologi starlink yang lebih cepat dan murah. Misalnya, dengan menyediakan perangkat

digital sederhana seperti tablet atau komputer, serta akses internet melalui jaringan satelit, anak-anak di Papua dapat mengikuti kelas online atau berbasis modul yang diunduh sebelumnya.

2. Dukungan Ekonomi untuk Keberlanjutan Pendidikan

Untuk memastikan anak-anak Papua tetap bersekolah, diperlukan program-program dukungan ekonomi seperti beasiswa, subsidi pendidikan, dan bantuan makanan di sekolah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, meningkatkan motivasi anak untuk belajar, dan menciptakan harapan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Dukungan ini juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif serta berdaya saing.

3. Pendekatan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Untuk mengatasi anomie dalam pendidikan di Papua, pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan yang relevan dengan konteks budaya lokal. Hal ini mencakup kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya Papua, serta pelatihan guru yang memahami konteks budaya setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amoah, S. K., & Ayim, A. (2018). The Theoretical Approaches of Durkheim, Parsons and Luhmann: Intra-traditional Differences, Interdependencies and Contradictions. *Journal of Advocacy, Research and Education*, 05(03). <https://oaji.net/articles/2020/1704-1600542791.pdf>
- Costa, F. M. L. (2023, September 24). *Anak Putus Sekolah di Papua Mencapai 314.606 Jiwa*. Kompas.id. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/24/314606-anak-tidak-bersekolah-tersebar-di-empat-provinsi-baru>
- Hirzi, R. H., Septiani, A., Hastuti, S. H., Muhsinah, J., Satriawan, R., & Abdullah, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Putus Sekolah Di Nusa Tenggara Barat Menggunakan Generalized Poisson Regression. *Jurnal Didika: Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(02). <https://doi.org/10.29408/didika.v9i2.22701>
- Huda, A. I., Saputra, G., & Fahmi, L. (2015). *Sistem Sosial Budaya Indonesia Teori Sistem Sosial (Emile Durkheim)*. https://www.academia.edu/15848995/Teori_Sistem_Sosial_Emile_Durkheim
- Irawan. (2024). Pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2023. In *Fungsional Perencanaan Muda- Bappeda Provinsi Papua*. <https://bappeda.papua.go.id/file/Paper%20Pendidikan%20Papua1.pdf>
- Jayani, D. H. (2019, August 29). *Alasan Putus Sekolah Terbanyak di Papua karena Tidak Ada Biaya*. databoks. Retrieved November 20, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/57fb8464804d70a/alasan-putus-sekolah-terbanyak-di-papua-karena-tidak-ada-biaya>
- Manik, Y. M., Prasetyo, N. E., & Sulistyono. (2023, March). Analyzing Education Quality in Papua Province Using Education Indicators. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan*, 09(01). <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/download/6989/4209>
- Mubarokah, L., Budiantara, N., & Ratna, M. (2016). Pemodelan Angka Putus Sekolah Usia SMP Menggunakan Metode Regresi Nonparametrik Spline di Papua. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 05(01), 103-108. <https://media.neliti.com/media/publications/15748-ID-pemodelan-angka-putus-sekolah-usia-smp-menggunakan-metode-regresi-nonparametrik.pdf>
- Navoleon, & Muljanto. (2023, December 29). Urgensi angka harapan sekolah anak sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 02(03). <https://doi.org/10.55904/cocreation.v2i3.1037>
- Ridwan, Irawaty, & Momo, A. H. (2019, January 12). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

- (Studi di Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana). *Selami IPS*, 12(01).
https://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/view/10838/7654?_cf_chl_tk=mPww_qZFytMYpMLD2z1qyXpM6sEyHnryMi7YqYgCtk0-1732433161-1.0.1.1-0YsLvV.F04gxM33pzt4YulgKC43L0DqWV.xD77t5_GY
- Rizaty, M. A. (2021, July 13). *5 Provinsi dengan Persentase Pemuda Tidak Pernah Sekolah Tertinggi (2020)*. Databoks. Retrieved November 15, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/c0b00431bb66e79/lebih-dari-20-pemuda-papua-tak-pernah-bersekolah-pada-2020>
- Saepuloh, D., & Suherman, A. (2018, July 2). Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, (28).
<https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/pelita/article/view/45/38>
- Saepuloh, D., & Suherman, A. (2019, January 21). Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 18(02), 98-111.
<https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/pelita/article/view/45>
- Sumule, A. (2021, January 4). *Infografik: Total Siswa Sekolah dan Tidak Sekolah di Provinsi Papua – Suara Papua*. Suara Papua. Retrieved November 18, 2024, from <https://suarapapua.com/2022/01/04/info-grafik-total-siswa-sekolah-dan-tidak-sekolah-di-provinsi-papua/>
- Wasilah, S. (2023, September 3). Education in a Functional Structural Perspective and Conflict Regarding Social Relations in Society. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 08(03).
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index>
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Papua. (n.d.). *DPPAD Papua: Konsep Kurikulum Darurat Sudah Dijalankan Tiga Bulan Lalu*. papua.go.id. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-7423/dppad-papua-konsep-kurikulum-darurat-sudah-dijalankan-tiga-bulan-lalu.html>
- Widi, S. (2022, November 29). *Peta Angka Putus Sekolah di Indonesia pada 2022, Papua Tertinggi*. DataIndonesia.id. Retrieved November 21, 2024, from <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/peta-angka-putus-sekolah-di-indonesia-pada-2022-papua-tertinggi>